

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, Joseph Nye menyatakan bahwa dunia internasional yang sedang kita jalani adalah zaman *hybrid*, dimana merupakan peralihan dari doktrin Westphalia tentang konsep “kedaulatan negara” menuju ke model *post*-Westphalia tentang perjalanan aktor-aktor transnasional dengan menerapkan norma-norma hukum humaniter internasional yang melintasi batas-batas kedaulatan negara.¹ Konsep kedaulatan negara saat ini lebih modern dan berubah dari sistem Westphalia. Doktrin Westphalia sudah tidak lagi relevan untuk digunakan sebagai kacamata dalam pergaulan masyarakat internasional yang semakin tidak terbatas dengan kemajuan teknologi informasi sebagai wujud dari era globalisasi. Dalam KBBI, globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses masuknya segala hal dalam lingkup dunia. Jan Aart Scholte memberikan definisi terkait globalisasi, dimana globalisasi merupakan proses peningkatan interdependensi antara aktor negara dan aktor non negara dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang berada pada skala global. Hal inilah yang menyebabkan pudarnya garis batas antar wilayah negara-negara, kemudahan penyebaran informasi, dan meluasnya

¹ Takdir A. Mukti, 2013, *Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy*, Jurnal Hubungan Internasional, 2(2), 175–176, lihat: <https://doi.org/10.18196/hi.2013.0039.175-183>

perdagangan sehingga membuat masyarakat semakin maju untuk meningkatkan kualitasnya dengan didukung oleh keterbukaan ruang sosial yang sangat luas.²

Pada dunia global ini, pengaruh globalisasi muncul dengan berbagai wujud, salah satunya adalah bentuk kerja sama yang tidak lagi hanya dilakukan oleh suatu negara melainkan juga aktor-aktor non negara seperti kelompok atau individu yang memiliki kepentingan tertentu. Hal ini merupakan bukti perubahan konsep kedaulatan negara secara fundamental dengan membentuk pola hubungan dan kerja sama internasional yang tidak hanya *state-centric*, melainkan lebih mengarah pada aktor-aktor transnasional dan *transgovernmental relations*. Aktor-aktornya meliputi INGO (*international non-governmental organization*), *foundation*, kelompok kepentingan ekonomi, *multinational cooperation*, dan juga *subnational*/pemerintah daerah. Dalam kajian hubungan internasional, aktivitas tersebut dikenal dengan istilah paradiplomasi atau *parallel-diplomacy* yang diperankan oleh pemerintah daerah dalam hal untuk kemajuan daerah bersama para mitra kerja samanya di luar negeri.³

Paradiplomasi merupakan sebuah kerangka kerja sama yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan kapasitasnya untuk melakukan hubungan dengan pihak asing di luar negeri demi mencapai kepentingan yang lebih spesifik di daerah/*subnational*.⁴ Dengan ini, terdapat tuntutan terhadap negara untuk membagi kekuasaannya dengan pemerintah di

² Muhammad Idris, *Pengertian Globalisasi, Ciri, Penyebab, Dan Dampaknya*, Kompas.Com, 2022, lihat: <https://money.kompas.com/read/2022/05/01/154914826>

³ Takdir Ali Mukti, *Op.Cit.*

⁴ Takdir Ali Mukti, *POLITIK PARADIPLOMASI DAN ISU KEDAULATAN DI INDONESIA*, ed. Sukma Putra Permana; Ahmad Sahide, 1st ed. (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2020)., 1-3

tingkat regional untuk mengelola wilayahnya sendiri secara lebih maksimal. Di negara maju, hal itu terlihat dari adanya proses kedaulatan yang berjalan semaksimal mungkin dan menjamin kesejahteraan bagi penduduknya. Hal tersebut lebih sering disebut dengan istilah “pembagian kekuasaan” atau “*power sharing*”.⁵ Konteks “*power sharing*” yang ada dalam aktivitas paradiplomasi harus dirumuskan dengan seksama untuk keperluan dalam menopang pencapaian pembangunan nasional.

Paradiplomasi yang baik dapat memberikan dampak positif yang baik bagi negara. Dampak itu dapat dilihat dari adanya dorongan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi dan integrasi diri ke proses integrasi regional, serta fenomena yang hadir di wilayah dan/atau yang dilatarbelakangi oleh dinamika kerja sama internasional, khususnya pada proses desentralisasi. Di Indonesia, aktivitas tersebut menunjukkan adanya keberhasilan pelaksanaan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah (*subnational*). Sebagai contoh, Kota Bandung dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengimplementasikan hasil dari aktivitas paradiplomasi ke wilayahnya hingga saat ini. Adapun pengaturan kerja sama luar negeri ini dilakukan berdasarkan pedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pasal 363 s.d. 369). Sedangkan, penjabaran mengenai teknis pelaksanaan kerja sama luar negeri diatur

⁵ Konsep ini sesuai dengan definisi **Politik-Hukum** (*legal policy*) yang dikemukakan oleh Mahfud MD, bahwa politik paradiplomasi dapat dikatakan sebagai garis kebijakan resmi pemerintah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan paradiplomasi dalam pembentukan aturan yang diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.

dalam Permendagri No. 25 Tahun 2020 dan UU No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah⁶.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah banyak melakukan kerjasama internasional dalam konteks paradiplomasi dengan banyak negara seperti Jepang, Republik Korea, RRT, Australia, Mesir, AS, Austria, Thailand, Jerman, serta beberapa INGO. Namun, berbagai kerja sama yang masih aktif sampai saat ini hanya ada 6 (enam) *sister province* saja. Kerja sama yang dilakukan meliputi *sister city/province* dengan provinsi lain di luar negeri, serta kerja sama dengan pihak non pemerintah asing. Hal ini dipengaruhi oleh kedekatan antara pemimpin DIY dengan pemimpin di negara asing. Kedekatan antara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Gubernur Prefektur Kyoto menjadi salah satu bukti kedekatan yang terjalin antara dua pemimpin daerah ketika melaksanakan tugas militer di Yogyakarta, tepatnya pada 16 Juli 1985. Hal ini mencetak sejarah adanya aktivitas paradiplomasi yang paling tua di Indonesia dengan akar kesamaan karakteristik daerah sebagai inti hubungan kerja sama yang sangat erat mulai dari masa pra otonom daerah hingga sekarang. Setelah diaturnya peraturan tentang otonomi daerah, kerja sama Pemda DIY dengan pemerintah daerah di luar negeri maupun pihak swasta asing semakin berkembang hingga saat ini. Kerja sama luar negerinya difokuskan pada bidang budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kepariwisataan

⁶ Presiden Republik Indonesia, “PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah,” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018,” 2018, lihat: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/85646/pp-no-28-tahun-2018>.

sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026.⁷

Kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemda DIY dijalankan berdasarkan visi misi dan arah pembangunan DIY dari tahun ke tahun, dimana pada hakekatnya selalu berfokus pada pengembangan kebudayaan yang merupakan wajah dari DIY dalam upaya untuk meningkatkan harmoni kehidupan masyarakat Yogyakarta. Hal ini dikarenakan oleh keadaan geografis DIY yang tidak mendukung pada sektor investasi, industri dan kekayaan alam yang terbatas. Oleh karenanya keterbatasan wilayah tersebut, Gubernur DIY, menyerukan bahwa yang harus dikembangkan adalah ciri khas Yogyakarta sebagai daerah yang banyak memiliki warisan budaya untuk mendukung pencapaian RPD DIY tahun 2023-2026 tersebut di atas.

Pembahasan penelitian dengan studi kasus kerja sama *sister province* antara DIY dan Victoria memiliki hal yang menarik untuk diteliti mengingat tema kerja sama *sister* yang mengupayakan kemajuan sektor kebudayaan, dimana dalam kerja sama ini keduanya mengkolaborasikan seni musik kontemporer yaitu gamelan dan musik orkestra dari Melbourne.⁸ Bagi Victoria, menurut Direktur Manager MSO, Sophie Galaise, DIY merupakan daerah sahabat yang sangat penting dalam hal hubungan bilateral dan kesepahaman kebudayaan antar masyarakat, bahkan DIY juga dianggap sebagai rumah kedua bagi MSO meskipun telah berkeliling dunia

⁷ Pemerintah Provinsi DIY, "Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022," Pub. L. No. Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022, V (2022).

⁸ Humas Pemda DIY, "Berkesempatan Belajar Di MSO, Youth Music Camp 2023 Dibuka," jogjaprovo.go.id, 2023, lihat: <https://jogjaprovo.go.id/berita/berkesempatan-belajar-di-mso-youth-music-camp-2023-dibuka>.

dan menjalin hubungan baik dengan para pemusik kelas internasional lainnya.⁹ Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Assegaf, dkk, kebudayaan menunjukkan entitasnya dalam hal untuk meningkatkan *close-bonding* antara Kota Yogyakarta dan Suriname melalui peresmian *Java Village* di Suriname untuk pengadaan festival kebudayaan adat Jawa.¹⁰ Adapun penelitian lain dengan tema yang sama disusun oleh Triadi Wicaksono yang membahas tentang kerja sama *sister province* antara Pemda DIY dan Prefektur Kyoto untuk merenovasi destinasi wisata cagar budaya di Kota Tua, Kota Gede hingga tahun 2014 yang bertujuan untuk mempromosikan potensi daerah dan menyediakan fasilitas di tempat-tempat daerah kunjungan wisata.¹¹ Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari Pemda DIY yang menganggap sektor kebudayaan menjadi vital keberadaannya untuk mendukung pembangunan di Yogyakarta.

Untuk itu, penelitian ini akan berfokus dalam melihat evaluasi kerja sama persahabatan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Victoria, Australia yang berlangsung pada bidang kebudayaan dengan menggunakan konsep paradiplomasi dan konsep *C2C Key Factors*, serta analisa SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kerja sama. Implementasi

⁹ Kundha Kabudayaan, “Konser Kolaborasi MSO Dan Youth Music Camp, Komposisi Baru,” budaya.jogjaprovo.go.id, 2023, lihat: <https://budaya.jogjaprovo.go.id/berita/detail/1474-konser-kolaborasi-mso-dan-youth-music-camp-komposisi-baru>.

¹⁰Yusuf Akhmad Assegaff, Christy Damayanti, and Herning Suryo, “Kerjasama Sister City Kota Yogyakarta-Distrik Commewijne Suriname Dalam Bidang Kebudayaan Tahun 2011-2014,” *Transformasi* 1, no. 28 (2015): 1–88, lihat: <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/1694>.

¹¹Triadi Wicaksono, “KERJASAMA PREFEKTUR KYOTO JEPANG DENGAN DIY MENANGANI PELESTARIAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA DI KAWASAN KOTA GEDE (1985-2014)” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), lihat: <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9684>.

kerja sama di bidang kebudayaan meliputi pengiriman delegasi kesenian dalam *Youth Music Camp* sepanjang masa berlaku MoU kerja sama persahabatan. Selain itu, hal ini juga menjadi salah satu prioritas pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat memperkenalkan budaya dengan memaksimalkan sumber daya berupa seniman muda dan kekayaan budaya Jawa, sehingga dapat tercapailah visi pembangunan daerah yang menjadikan Masyarakat Jogja yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.¹² Adapun pada bidang lainnya, Industri Kreatif dan Inovasi Industri, hanya diimplementasikan pada saat yang bersamaan dengan kunjungan delegasi DIY ke Melbourne melalui *Creative Economic Forum* (CEF). Sedangkan pada bidang pendidikan melalui kegiatan *Youth Leaders* baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan tidak dapat dilanjutkan karena pandemi COVID-19.¹³

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana evaluasi kerja sama *sister province* antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Negara Bagian Victoria, Australia di bidang kebudayaan memunculkan strategi-strategi baru dalam implementasi kerja sama melalui analisa SWOT?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana evaluasi kerja sama *sister province* DIY-Victoria Australia di bidang kebudayaan

¹² Humas Pemda DIY, *SATRIYA*, Jogjaprov.Go.Id, lihat: <https://jogjaprov.go.id>

¹³ Roza Yulia Sari et al., "*Bunga Rampai Kerjasama Luar Negeri*," 2022.

memunculkan strategi-strategi baru dalam implementasi kerja sama melalui analisa SWOT.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan akan bermanfaat bagi kalangan akademisi yang memiliki *curiosity* terhadap perkembangan kajian ilmu Hubungan Internasional yang untuk mendapatkan informasi terkait aktivitas paradiplomasi di Indonesia, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis berharap jika penelitian ini akan bermanfaat bagi para mahasiswa untuk menyusun naskah penelitian yang memiliki kesamaan topik pembahasan dengan penelitian ini. Adapun terkait dengan topik pembahasan, penulis mengharapkan akan ada perkembangan kajian yang ditulis di kemudian hari yang memuat data terbaru terkait aktivitas paradiplomasi di lingkup Pemda DIY.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi rujukan bagi pemerintah daerah dan juga mitra kerja sama luar negerinya untuk keberlangsungan kerja sama. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi daerah lain untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki, sehingga semakin banyak pemerintah daerah di Indonesia untuk membuka diri akan pentingnya kerja sama internasional dalam rangka memajukan daerahnya.

1.4 Penelitian Terdahulu

Sebagai kebutuhan penelitian, adanya kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian yang telah ada penting dilakukan untuk menghindari adanya bentuk plagiasi dan menunjukkan kebaruan penelitian. Penulis telah melakukan

pengumpulan data melalui berbagai sumber berupa jurnal, *proceeding*, dan skripsi yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, penulis akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan pada isu yang diangkat yaitu berkaitan dengan aktivitas paradiplomasi di Indonesia sebagai data pendukung penelitian. Berikut ini adalah penjabaran tentang penelitian terdahulu yang diklasifikasikan menjadi dua klasterisasi, yaitu Paradiplomasi dan Kerja Sama *Sister* di Indonesia dan Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Kerja Sama Luar Negeri di DIY.

1.4.1 Paradiplomasi dan Kerja Sama *Sister* di Indonesia

Penelitian pertama berasal dari jurnal yang disusun oleh **Sri Issundari** berjudul “**Paradiplomacy and Indonesian Public Diplomacy**”. Penelitian ini mengungkapkan keterkaitan yang erat antara aktivitas paradiplomasi dan diplomasi publik. Penelitian ini mengambil *case studies: International Cooperation of Yogyakarta-Kyoto dan Bandung-Braunswieg* dalam *scope* aktivitas paradiplomasi di Indonesia yang telah berjalan berpuluh tahun yang lalu. Dimana letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah studi kasus yang digunakan dalam penelitian. Menurut Issundari, kerja sama antar dua *subnational* ini menunjukkan identitas dirinya sebagai *agent of public diplomacy*, bahkan sebelum ada peraturan tentang *regional autonomy* di Indonesia. Kerja sama internasional yang dilakukan oleh keduanya didefinisikan sebagai bentuk komunikasi dan pertukaran informasi yang memberikan dampak terhadap persamaan persepsi antara keduanya, bahkan yang berkaitan dengan *border context* di wilayah perbatasan masing-masing.

Dengan adanya upaya kerja sama yang dilakukan, kedua *subnational* menginginkan adanya *problem solving* dalam mengatasi *common problem* yang ada. Issundari mendefinisikan paradiplomasi berdasarkan konsep yang dimunculkan oleh Duchacek yang menjelaskan tentang keterlibatan *constituent units (local/regional or subnational)* dalam aktivitas internasional. Di mana peran *regional government* sangat dibutuhkan dalam mengatasi hal-hal yang tidak dapat teratasi oleh *state-actor*. Andre Lecour menggunakan istilah *second world* sebagai yang merepresentasikan pemerintah daerah/*subnational* sebagai *non-state actor* yang tidak memiliki legitimasi terhadap hal-hal yang terkait dengan kedaulatan. Keterlibatan pemerintah daerah atau *subnational* dianggap sebagai salah satu bentuk (*agent*) kegiatan diplomasi publik dalam upaya untuk mencapai kesepahaman dan kerja sama yang mutualisme oleh *subnational*.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa paradiplomasi merupakan pendukung bagi keeratan dan kelanggengan hubungan antara Indonesia dengan negara mitranya. Keduanya tidak hanya saling bisa saling berdialog dan menghargai satu dan lainnya, bersamaan dengan itu sebuah negara juga dapat membentuk *international society* yang positif demi kemajuan wilayahnya.

Penelitian kedua berasal dari proceeding ICOCSPA 2016 yang disusun oleh **June Cahyaningtyas, Sri Issundari, Asep Saepudin** berjudul “***The Implementation of Public Diplomacy Through Paradiplomatic Activities for An Effective Place Branding***” menjelaskan tentang bagaimana aktivitas paradiplomasi

¹⁴ Sri Issundari, “Paradiplomacy and Indonesian Public Diplomacy,” ATLANTIS PRESS 231, no. Amca (2018): 156–59, <https://doi.org/10.2991/amca-18.2018.44>.

sebagai bentuk implementasi dari *public diplomacy* yang bertujuan untuk mewujudkan *branding* wilayah yang efektif. Penelitian ini berkontribusi dalam penelitian penulis tentang analisa SWOT pada bagian pembahasan, terutama pada aspek weaknesses. Cahyaningtyas, dkk menjelaskan ada tiga isu dasar yang dihadapi oleh *non-state actors* dalam mengimplementasikan peranan diplomasi publik pada aktivitas paradiplomasi di tingkat *municipalities/local government*. Kendala pertama adalah keterbatasan pemahaman antara para *policy makers* di tingkat pemerintah daerah tentang apa yang dimaksud dengan hubungan kerja sama internasional dan bagaimana merealisasikan hubungan tersebut. Kedua, di dalam lingkup pemerintah daerah terjadi kekurangan SDM yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang berkaitan dengan kerja sama internasional dimana hal ini dapat menghambat keberlangsungan paradiplomasi di suatu daerah. Kemudian, keterbatasan infrastruktur yang mendukung kegiatan kerja sama internasional.

Pemerintah daerah diharapkan untuk selalu mengingat arti penting pelaksanaan paradiplomasi sebagai langkah untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi, adanya pembangunan dan meningkatnya jumlah infrastruktur dan fasilitas umum sebagai efek dari kerja sama internasional, bukan dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan tunai, akan tetapi semata-mata hanya karena untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memudahkan akses para pengusaha, turis, dan investor (TTI) untuk mengunjungi daerah itu. Pun juga dengan adanya dukungan dari orang-orang yang kreatif, maka

paradiplomasi akan menjadi hal yang sangat membantu perkembangan daerah, bahkan untuk *branding* negara.

Selanjutnya, terdapat jurnal yang disusun oleh Yusep Ginanjar, Obsatar Sinaga, Taufik Hidayat, dan Akim yang berjudul “***EFFECTIVENESS OF SISTER PROVINCE BETWEEN WEST JAVA AND CHONGQING IN THE TOURISM SECTOR***” menjelaskan tentang bagaimana Hans Buis menjelaskan bagaimana sebuah *city-to-city cooperation* (C2C) dapat dianalisa menggunakan beberapa indikator faktor-faktor kesuksesan. Faktor-faktor yang dimaksud dapat mempengaruhi seberapa efektif kerja sama itu berjalan pada implementasinya. Adapun beberapa faktor yang dapat dianalisa untuk melihat efektivitas kerja sama *sister province* antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Chongqing di bidang pariwisata adalah *open discussion, problem analysis, agreement on strategy, objectives and results, joint steps in implementation, regular contacts, reporting*, dan *joint review of partnership progress and priority arrangement*, serta *joint monitoring and evaluation*.

Selain itu, menurut Buis terdapat dua karakteristik lain yang juga memainkan peran penting dalam untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas sebuah kerja sama persahabatan atau meningkatkan *interest*-nya untuk menjalin kemitraan dengan para pihak di luar negeri. Kedua karakteristik yang dimaksud adalah adanya inisiasi kerja sama oleh pemerintah daerah sebelum menjalin kesepakatan kerja sama, dan bagaimana pemerintah daerah atau *subnational* mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas kemitraan dengan daerah di luar negeri. Maka dari itu, dari semua

penjelasan tersebut kita dapat melihat apa yang dapat dihasilkan dari kerja sama dan membuat daftar prioritas kerja sama lanjutan di kemudian hari.

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk mendukung argumen penulis dalam menguatkan argumen penulis tentang pentingnya kebudayaan sebagai salah satu bidang yang difokuskan dalam *sister province* antara Pemda DIY dan Negara Bagian Victoria, Australia. Hal yang menjadi kesamaan adalah tema penelitian tentang aktivitas paradiplomasi dalam bentuk *sister province* dengan menggunakan studi kasus yang berbeda dengan memaksimalkan potensi dari *tourism* yang tersedia. Baik *tourism* maupun kebudayaan merupakan dua hal yang saling melengkapi, karena eksistensi kebudayaan di suatu daerah dapat menjadi satu dari banyaknya hal menarik bagi para wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik.

1.4.2 Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Kerja Sama Luar Negeri di DIY

Penelitian keempat berasal dari skripsi yang disusun oleh **Arsil Nyong** berjudul **“PENGARUH PENERAPAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DI YOGYAKARTA”** yang membahas tentang dinamika hukum otonomi daerah yang ada setelah masa reformasi dan ditandai oleh berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 menjadi dimensi kebijakan pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia. Paradigma hubungan pusat dan daerah telah berubah secara mendasar dengan penghapusan ciri hubungan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Pergeseran ini memberikan dukungan terhadap pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama

luar negeri dengan legitimasi yang dimilikinya. Desain peraturan otonomi daerah mengalami perubahan yang sebelumnya diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 kini diperbaharui dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat aktif dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak asing. Hal ini dilakukan oleh Pemda DIY untuk memenuhi target dalam visi dan misi daerah tersebut yaitu dengan membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, mengembangkan pendidikan berkarakter dan didukung oleh pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya yang dimiliki. Kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemda DIY merupakan bentuk aktivitas paradiplomasi dalam berupa kerja sama *sister province*. Visi dan misi Daerah Istimewa Yogyakarta tercantum dalam RPJPD DIY tahun 2005-2025 dan RPJMD tahun 2012-2017 sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Isu-isu yang diikuti oleh Pemda DIY di kancah internasional maupun nasional meliputi pembangunan yang *pro poor, pro job, pro-environment*, pengarusutamaan gender, pendidikan untuk semuanya, dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap dokumen-dokumen perencanaan pemerintah daerah. Maka dari itu, Pemda DIY sangat gencar dalam mengembangkan kerja sama luar negerinya dengan banyak negara.

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyusun naskah penelitian. Penulis dapat menambah referensi terkait apa yang menjadi landasan

hukum pelaksanaan paradiplomasi di Indonesia, terutama dalam hal ini berfokus di daerah Yogyakarta. Selain landasan hukum, penulis juga mendapatkan informasi terkait visi dan misi Pemda DIY yang sangat berpengaruh terhadap pokok pembahasan tentang efektivitas kerja sama *sister province* antara DIY dan Victoria, Australia.

Penelitian kelima berasal dari skripsi yang disusun oleh **Faizal Malik** berjudul **“STRATEGI PEMERINTAH D.I YOGYAKARTA DALAM MEMPROMOSIKAN PARIWISATA DAERAH KE LUAR NEGERI TAHUN 2009-2014”** yang mana secara umum menjelaskan tentang strategi apa yang digunakan oleh Pemda DIY dalam hal memperkenalkan budaya lokal dan tempat wisata. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan tentang apa yang menjadi strategi Pemda DIY dalam mempromosikan potensi daerah melalui bidang pariwisata ke luar negeri. Pemda DIY mengakui bahwa sektor pariwisata merupakan potensi unggulan yang dimilikinya dan bukan merupakan daerah penghasil migas. Sektor ini telah mendukung pengembangan sektor lainnya seperti sektor ekonomi, sektor budaya, dan aspek sosial. Kelestarian budaya yang terjaga di provinsi ini telah diakui oleh banyak pihak dan akan terus dilestarikan oleh pemerintah daerah setempat. Di samping itu, kekayaan dan keharmonisan kebudayaan yang masih kental di Yogyakarta telah membawa dampak positif bagi meningkatnya jumlah kunjungan turis domestik dan mancanegara.

Tidak hanya itu, para tamu asing yang menjabat sebagai pejabat negara, komunitas asing, juga tercatat dalam catatan Pemda DIY, yaitu pada buku tamu resmi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga jumlah kunjungan para

tamu dan wisatawan ini dicatat sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia. Dengan upaya pengembangan sektor wisata, Pemda DIY berharap hal ini dapat menjadi salah satu pendukung penguatan ekonomi dan pendapatan daerah. Sektor ini sangat dekat dengan aktivitas masyarakat dan dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran tingkat daerah. Pemda DIY telah merencanakan untuk membentuk rencana strategis untuk melakukan manajemen pariwisata dan pembangunan daerah dengan menjalin kerjasama internasional sebagai strategi promosi ke luar negeri.

Hal-hal yang dilakukan oleh Pemda DIY adalah melakukan promosi pariwisata melalui aktivitas paradiplomasi, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah DIY dan provinsi-provinsi di Korea Selatan dan kerjasama DIY dan Prefektur Kyoto. Upaya kedua yaitu promosi pariwisata melalui diplomasi kebudayaan seperti pertunjukan Gamelan di *Edinburgh International Festival*, event *Association Travel Agent Singapore (ATAS) 2013*, promosi ke Eropa melalui *Internationale Tourismus Borse*, Berlin, Jerman serta penyelenggaraan Borobudur International Festival. Upaya selanjutnya yaitu dengan mengadakan konferensi yang dilaksanakan pada *East Asia Inter-Regional Tourism Forum (EATOF)* dan *Pacific Asia Travel Association (PATA)*.

Penelitian keenam berasal dari artikel jurnal yang disusun oleh **Yusuf Akhmad Assegaff, Christy Damayanti, dan Herning Suryo** berjudul **“KERJA SAMA SISTER CITY KOTA YOGYAKARTA-DISTRIK COMMEWIJNE SURINAME DALAM BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2011-2014”** mengatakan bahwa kehadiran pemerintah lokal dalam panggung dunia

internasional sebagai *non-state actor* telah memperlihatkan kemahirannya dalam melaksanakan kerja sama internasional. Kerja sama tersebut dapat disebut sebagai *sister city* (antar kota) yang didasarkan pada faktor persamaan karakteristik kedua daerah. Salah satu contoh yang diambil dalam penelitian ini adalah kedekatan antara Kota Yogyakarta dan Distrik Commewijne sudah yang telah berlangsung sejak abad ke-18, dimana sekitar 15% penduduk Suriname merupakan keturunan Suku Jawa yang menjabat sebagai Menteri Kabinet di negara tersebut.

Hubungan Kota Yogyakarta dan Distrik Commewijne ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia-Suriname. Hal ini terlihat dari adanya aktivitas ekspor Indonesia ke Suriname yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tentunya, hal ini juga diharapkan akan memperkuat kerja sama bilateral keduanya untuk bidang lainnya. Penguatan kerja sama ini dibuktikan dengan adanya pengesahan dan penandatanganan kesepakatan kerja sama di bidang kebudayaan antara Indonesia-Suriname tahun 2011-2013. Kegiatan tersebut diwakilkan oleh Sekjen Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Wardiyatmoko dan Kementerian Pendidikan Republik Suriname, Stanley Sidoel. Kerja sama ini memberikan dampak positif bagi pengembangan kebudayaan, baik di Kota Yogyakarta maupun Distrik Commewijne. Salah satu bidang pengembangan kebudayaan yang dilakukan adalah pengenalan budaya Jawa kepada masyarakat Commewijne dengan mendatangkan tenaga pelatih bahasa Jawa, musik karawitan dan tarian Jawa klasik. Selain itu, juga terdapat peresmian *Java Village* di Distrik Commewijne yang dapat memberikan atmosfer budaya Jawa di beberapa wilayah. Pameran *Indofair* juga menunjukkan

adanya ketertarikan masyarakat di Distrik Commewijne yang dapat dilihat dari banyaknya produk terjual dalam pameran tersebut.

Penelitian ketujuh berasal dari skripsi yang disusun oleh **Khaki Murrijal** berjudul **“KEBERHASILAN KERJA SAMA *SISTER CITY* ANTARA KOTA YOGYAKARTA DENGAN VASTERBOTTEN COUNTY COUNCIL SWEDIA”** yang membahas tentang peralihan isu keamanan di dalam kajian hubungan internasional ke isu ekonomi dan kemanusiaan yang dipengaruhi oleh globalisasi. Saat ini baik negara maupun aktor non negara dapat melakukan interaksi yang seolah-olah tidak ada batas-batas geografis yang membatasi pergerakan para aktor transnasional (*de-bordering*). Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan telekomunikasi dan transportasi yang lebih efisien yang mendukung pergerakan manusia yang lebih fleksibel dan pertukaran informasi, arus barang, jasa, modal, pengetahuan, dan lain sebagainya semakin cepat bergerak dan menunjukkan interaksi antar aktor di seluruh dunia.

Kerja sama yang dijalin keduanya disebut dengan *sister city* yang diartikan sebagai hubungan “kota bersaudara” yang dilakukan oleh Pemerintah Kotamadya/Daerah Tingkat II, Pemerintah Kota Administratif dengan pemerintah setingkatnya di luar negeri. Kerja sama *sister city* antara Kota Yogyakarta dan Vasterbotten County Council Swedia menjadi contoh adanya komitmen yang besar dari pemerintah setempat untuk melibatkan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi, misalnya pada bidang kesehatan dan pelayanan publik. Pada tahun 2016 kasus demam berdarah (*dengue*) menunjukkan peningkatan yang signifikan di Kota Yogyakarta yang diakibatkan oleh keterbatasan teknologi, serta

tantangan bagi pemerintah setempat untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Di sinilah peranan implementasi kerja sama *sister* terlihat, dimana pemerintah di Vasterbotten County Council, Swedia berupaya memberikan bantuan kemanusiaan untuk membantu pemerintah setempat menekan laju peningkatan kasus demam berdarah di Yogyakarta.

Penelitian kedelapan berasal dari skripsi yang disusun oleh **Triadi Wicaksono** berjudul “**KERJA SAMA PEFKUR KYOTO JEPANG DENGAN DIY MENANGANI PELESTARIAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA DI KAWASAN KOTA GEDE (1985-2014)**” yang membahas tentang kepentingan Yogyakarta dalam menjalin kerjasama dengan Prefektur Kyoto untuk menangani masalah pelestarian lingkungan cagar budaya di kawasan Kota Gede DIY. Hal ini dilakukan karena adanya visi misi yang ingin dicapai demi mensejahterakan masyarakat dengan pelayanan publik yang memadai. Dengan berbagai potensi yang banyak dimiliki oleh Yogyakarta terutama di bidang pariwisata dan kebudayaan, yang mana hal ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik mancanegara maupun domestik.

Salah satu destinasi wisata yang ditonjolkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kawasan Cagar Budaya Kota Gede. Wilayah ini dikenal sebagai sentra kerajinan perak yang banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu kawasan ini seolah termakan zaman, sehingga kurang mendapatkan perhatian khusus, terlebih saat setelah terjadinya gempa bumi yang melanda wilayah DIY. *Sister province* yang telah dilaksanakan oleh Pemda DIY dan Prefektur Kyoto seolah memberikan garis terang akan pelestarian kawasan

Cagar Budaya Kota Gede ini. Bersama dengan Prefektur Kyoto, Pemda DIY mulai membangun kembali sektor pariwisata tersebut agar tetap bisa menggerakkan kembali perekonomian masyarakat setempat. Kerja sama *sister province* ini berperan sangat krusial dalam renovasi kawasan tersebut. Maka dari itu, kerja sama antara Pemda DIY dan Prefektur Kyoto yang terus diperbaharui dan diperkuat sejak tahun 1985.

Tabel 1. 1 *Posisi Penelitian*

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1.	Sri Issundari “ <i>Paradiplomacy and Indonesian Public Diplomacy</i> ”	Jenis Penelitian: Eksplanatif Alat Analisa: <i>Dimension of Public Diplomacy and Level of Engagement, Paradiplomacy</i>	Salah satu aktor <i>non-state</i> yang memiliki peranan penting dalam mendukung <i>state’s public diplomacy</i> adalah <i>subnational/local government</i> . Aktivitas ini dilakukan untuk mendorong terjadinya <i>bond emotional closeness</i> antar negara serta menciptakan <i>mutual understanding</i> antar pihak yang juga sering disebut dengan aktivitas paradiplomasi. Intensitas aktivitas yang dilakukan oleh <i>subnational</i> dan rekan kerjasamanya dalam waktu yang cukup lama, dapat

			<p>membentuk kedekatan yang begitu erat dan saling mengapresiasi. Hal ini membentuk kerangka kerjasama internasional yang positif sebagai respon terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, sebagaimana terlihat pada aktivitas paradiplomasi oleh Yogyakarta-Kyoto dan Bandung-Barunswigare.</p>
2.	<p>June Cahyaningtyas, Sri Issundari, Asep Saepudin</p> <p><i>“The Implementation of Public Diplomacy Through Paradiplomatic Activities for An Effective Place Branding”</i></p>	<p>Jenis Penelitian: Eksplanatif</p> <p>Alat Analisa: <i>The Insertion of Public Diplomacy in Place Branding Activity, Concept of Public Diplomacy, Degree of Implementation of Public Diplomacy</i></p>	<p>Daerah telah mengembangkan aktivitas <i>place branding</i>-nya sebagai salah satu strategi pemasaran demi memacu pembangunan daerah. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam efektivitas pelaksanaan <i>place branding</i>. Kombinasi antara <i>public diplomacy</i> dan paradiplomasi yang diterapkan di tingkat regional, menempatkan paradiplomasi sebagai pelaku aktif kegiatan diplomasi yang biasanya dimaknai terpusat di level nasional. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi para aktor di tingkat daerah untuk berpartisipasi aktif dalam</p>

			keuntungan mempromosikan dan meningkatkan komparasi regionalnya.
3	Yusep Ginanjar, dkk, <i>“EFFECTIVENESS OF SISTER PROVINCE BETWEEN WEST JAVA AND CHONGQING IN THE TOURISM SECTOR”</i>	Jenis Penelitian: Deskriptif-Kualitatif Alat Analisa: <i>Key Success Factors of C2C Cooperation by Hans Buis 2009</i>	Hans Buis menjelaskan bagaimana sebuah <i>city-to-city cooperation</i> (C2C) dapat dianalisa menggunakan beberapa indikator faktor-faktor kesuksesan. Faktor-faktor yang dimaksud dapat mempengaruhi seberapa efektif kerja sama itu berjalan pada implementasinya. Adapun beberapa faktor yang dapat dianalisa untuk melihat efektivitas kerja sama <i>sister province</i> antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Chongqing di bidang pariwisata adalah <i>open discussion, problem analysis, agreement on strategy, objectives and results, joint steps in implementation, regular contacts, reporting, dan joint review of partnership progress and priority arrangement, serta joint monitoring and evaluation.</i>
4.	Arsil Nyong “PENGARUH	Jenis Penelitian:	Pelaksanaan paradiplomasi DIY mengacu pada undang-

	<p>PENERAPAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DI YOGYAKARTA”</p>	<p>Deskriptif- Kualitatif</p> <p>Alat Analisa: Kebijakan Otonomi Daerah, Aktor-aktor HI</p>	<p>undang otonomi daerah Indonesia. Hal ini berdampak baik bagi tingkat pertumbuhan perekonomian di Yogyakarta. Pemerintah DIY mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan hukum dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan aktor yang sederajat. Maka perlu adanya aturan yang jelas untuk mempertegas kewenangan dan batas-batas yang harus diperhatikan oleh pemerintah lokal dalam menjalin kerjasama internasional dengan pihak asing. Kegiatan ini <i>massive</i> dilakukan di lingkup DIY untuk membentuk SDM yang mumpuni dan mensejahterakan masyarakat.</p>
5.	<p>Faizal Malik “STRATEGI PEMERINTAH D.I YOGYAKARTA DALAM MEMPROMOSIKAN PARIWISATA DAERAH KE LUAR</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa: Strategi Pemerintah D.I Yogyakarta untuk promosi pariwisata ke luar negeri</p>	<p>Pemerintah D.I Yogyakarta melakukan strategi kebijakan untuk mempromosikan pariwisatanya melalui program <i>sister city/province</i> dalam kerangka paradiplomasi, terutama dengan Jepang. Strategi lainnya yaitu dengan menggunakan diplomasi</p>

	NEGERI TAHUN 2009-2014”		kebudayaan yang dilakukan dalam berbagai event, pameran, dan konferensi dengan pihak-pihak terkait.
6.	Yusuf Akhmad Assegaff, dkk. “KERJA SAMA SISTER CITY KOTA YOGYAKARTA-DISTRIK COMMEWIJNE SURINAME DALAM BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2011-2014”	Jenis Penelitian: Deskriptif Alat Analisa: Kerja sama <i>Sister City</i> Kota Yogyakarta dan Distrik Commewijne dalam bidang kebudayaan pada tahun 2011-2014	Kerja sama sister city yang dilakukan oleh Kota Yogyakarta dan Distrik Commewijne telah membangun mutual understanding antara dua wilayah yang akan berdampak pada hubungan bilateral antar kedua negara. Penelitian ini berfokus pada penjelasan mengenai bagaimana proses kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak sehingga dapat memunculkan keharmonisan dan mendukung hubungan kerja sama, baik bagi pemerintah daerah maupun negara dengan mitranya.
7.	Khaki Murrijal “KEBERHASILAN KERJA SAMA SISTER CITY ANTARA KOTA YOGYAKARTA DENGAN VASTERBOTTEN	Jenis Penelitian: Eksplanatif Alat Analisa: Landasan Hukum Kerja sama <i>Sister City</i>	Berkembangnya kajian hubungan internasional yang dijalankan saat ini, membuka peluang bagi para aktor transnasional untuk melakukan kerja sama internasional dan tidak bersifat <i>state-centric</i> . Kerjasama yang dilakukan oleh Kota Yogyakarta dan

	COUNTY COUNCIL SWEDIA”		Vasterbotten County Council Swedia telah memberikan gambaran hubungan luar negeri yang dijalankan pemerintah lokal/ <i>subnational</i> dalam menangani kasus yang terjadi di antara kedua belah pihak.
8.	Triadi Wicaksono “KERJA SAMA PREFEKTUR KYOTO JEPANG DENGAN DIY MENANGANI PELESTARIAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA DI KAWASAN KOTA GEDE (1985-2014)”	Jenis Penelitian: Deskriptif Alat Analisa: Paradiplomasi, Kepentingan Nasional/Daerah	Kerja sama <i>sister province</i> antara DIY dan Prefektur Jepang telah dijalin sejak tahun 1985 karena memiliki karakteristik yang sama. Kerja sama ini terus diperbaharui dan diperkuat dengan adanya berbagai macam event atau pameran yang rutin digelar di kedua wilayah. Keberlangsungan kerja sama ini terletak pada bidang pariwisata, budaya, industri kerajinan, pendidikan, dan pertanian. Pada tahun 2012 misalnya, peringatan kerja sama ke-27 dilaksanakan pada bulan Juli di Jogja Nasional Museum. Banyaknya potensi yang dimiliki DIY membuat para investor asal Jepang tertarik untuk berinvestasi di wilayah ini.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Paradiplomasi

Aktivitas paradiplomasi disebutkan sudah ada sejak tahun 1950-an, menurut para sarjana Amerika Serikat, hadirnya paradiplomasi dapat dilihat pada saat terjadi hubungan dagang antara negara bagian Selatan AS dengan beberapa provinsi yang ada di Kanada dengan tujuan untuk memperluas pasar perdagangan regional, serta menarik investasi asing. Perjalanan kegiatan paradiplomasi semakin gencar dilakukan oleh para *non-state actors* dikarenakan oleh adanya kepentingan untuk menambah pendapatan daerah melalui investasi dan perluasan pasar ke luar negeri, juga untuk mencari bantuan asing (*foreign aid*). Kerja sama yang dimaksud difokuskan pada bidang-bidang seperti kebudayaan, pendidikan, pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perdagangan lintas batas, dan isu lingkungan.¹⁵

Paradiplomasi mulai dianggap sebagai sebuah konsep baru dalam kajian hubungan internasional yang diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan yang berasal dari Basque Country di tahun 1980-an, Panayotis Soldatos. Soldatos menjadi salah satu aktor yang berperan dalam perdebatan akademik pada waktu itu. Menurut pendapat Aldecoa, Keating, dan Boyer istilah paradiplomasi merujuk pada gabungan kata dari “*parallel-diplomacy*” yang didefinisikan sebagai “*the foreign policy of non-central government*”.¹⁶ Ivo Duchacek juga berusaha mendefinisikan

¹⁵ Dadang Mujiono, "Mengenal Paradiplomasi: Sejarah Dan Implementasinya Di Indonesia", *Kompas.Com*, 2022, lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/21/16385771/>

¹⁶ Takdir Ali Mukti, *Op. Cit.*

paradiplomasi sebagai keterlibatan *constituent units (local/regional government or subnational)* dalam aktivitas internasional, beliau juga memberikan istilah lain dari paradiplomasi yaitu “*micro-diplomacy*”. Dimana *Local Government* atau pemerintah daerah/negara bagian merupakan representasi dari sebuah negara yang memiliki tugas untuk mengembangkan potensi di wilayahnya yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah pusat.¹⁷

Rodrigo Tavares membedakan paradiplomasi dan diplomasi antara lain: isu yang dikerjasamakan (*on the issue*), ketertarikan untuk berpartisipasi (*on participation*), metode yang digunakan (*on the modus operandi*), dan tujuan yang ingin dicapai (*on the final goal*). Keempat hal tersebut menjelaskan perbedaan yang signifikan antara paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan diplomasi oleh negara. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah (*subnational government*) diharuskan untuk mengangkat isu-isu yang *low-politics*, pelaksanaannya yang berbasis pada bisnis sektor swasta, lembaga nonprofit/nirlaba, organisasi sipil yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan keunggulan daerah, metode yang digunakan juga berdasarkan pada konteks yang lebih pragmatis dan tepat sasaran, sehingga dapat mewujudkan tujuan yang diutamakan demi kesejahteraan masyarakat setempat.¹⁸

Di Eropa, istilah paradiplomasi lebih dikenal dengan sebutan Kerjasama Kota Kembar yang pertama kali ada pada tahun 1920-an oleh Keighley, Yorkshire Barat (kota di Inggris saat ini) dengan Poix-du nord, Nord, Perancis menyusul

¹⁷ Sri Issundari, *Op., Cit.*

¹⁸ Rodrigo Tavares, *PARADIPLMACY: Cities and States as Global Players* (Oxford University Press, 2016). 116-118.

berakhirnya perang dunia I. Namun, kerjasama ini tidak resi karena ketiadaan penandatanganan kerjasama hingga tahun 1986. Sedangkan di Amerika Utara, Australia, dan Asia, istilah kerjasama ini disebut Kerjasama *Sister City/Province*.¹⁹ Kerjasama *sister* dapat dimaknai sebagai hubungan kerjasama provinsi bersaudara yang dilakukan antara pemerintah daerah yang menjalin hubungan dengan pemerintah daerah setingkat di luar negeri. Hubungan kerjasama ini dimaksudkan untuk membentuk program kegiatan yang tepat dan terencana untuk bidang-bidang yang akan dijadikan objek kerjasama, tujuan kerjasama bidang tersebut, kontribusi terhadap biaya dan masa kerjasama yang akan atau sedang dijalankan. Kemiripan yang dimaksud dalam kerjasama *sister* adalah adanya latar belakang sejarah, kemiripan budaya, dan kemiripan geografis di antara kedua daerah.²⁰

Paradiplomasi yang dianggap sebagai bentuk aktivitas hubungan luar negeri dilakukan oleh *non-state actors* yaitu *third groups non-government* meliputi pemerintah daerah, Lembaga Internasional atau NGO, dan Mitra Pembangunan. Aktor-aktor tersebut muncul sebagai respon perkembangan sistem internasional oleh pengaruh globalisasi, krisis ekonomi internasional, dan kemandirian, serta sebagai wujud perubahan yang terjadi di sebuah negara dikarenakan oleh adanya pengintegrasian demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan ekonomi. Pergeseran paradigma ini dapat dilihat dari adanya peranan aktor non-negara dalam lingkup

¹⁹ Triadi Wicaksono, *KERJASAMA PREFEKTUR KYOTO JEPANG DENGAN DIY MENANGANI PELESTARIAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA DI KAWASAN KOTA GEDE (1985-2014)*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 2016), 5-6, lihat: <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9684>

²⁰ Rizqi P. P. A. Apriandari, 2017, *KERJASAMA SISTER PROVINCE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN SAINT PETERSBURG (RUSIA)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lihat: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12278/12>

global yang membawa isu-isu yang bersifat *low politics* seperti perdagangan lintas batas, promosi wisata lokal, dan kampanye penyelamatan lingkungan. Sedangkan isu-isu yang bersifat *high politics* tetap berada pada ranah aktor negara karena menyangkut kepentingan nasional.²¹

Di Indonesia, konsep paradiplomasi mulai terbuka dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama internasional. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU tersebut diperbaharui menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 10 Ayat (1) dimana tertulis urusan absolut Pemerintah yang tidak dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pada Bab I A Poin 5 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah ditegaskan bahwasannya politik luar negeri merupakan kekuasaan absolut Pemerintah yang hanya dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai wakil Pemerintah melalui asas dekonsentrasi.²²

²¹ Dameria Febriyanti Panjaitan, *KEBIJAKAN UMUM KERJA SAMA DAERAH DENGAN LUAR NEGERI*, (Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri: 2023).

²² Pasal 1 Ayat (9) UU Nomor 23 Tahun 2014 Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang mana menjadi kewenangan absolut Pemerintah Pusat kepada gubernur yang menjadi wakil Pemerintah Pusat di daerah, kepada instansi yang memiliki hubungan vertikal dengan Pemerintah Pusat di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur beserta bupati/walikota yang bertugas sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan secara umum. lihat dalam Presiden Republik Indonesia, 2014, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*, JDIH BPK., diakses dari web: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

Dalam hal ini, Pemda DIY telah banyak melakukan aktivitas paradiplomasi sebagai representasi negara untuk mengembangkan potensi daerahnya melalui kerja sama persahabatan dengan berbagai mitra di luar negeri. Wujud kerja sama yang dilakukan berbentuk *sister province* bersama pemerintah daerah yang sederajat di luar negeri. Hal inilah yang menjadi dasar keinginan Pemerintah Daerah agar dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di bidang kebudayaan dan pariwisata. Oleh karena itu, esensi daripada tujuan dibentuknya kerja sama persahabatan ini, yaitu untuk membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera, dengan kerja sama yang saling menguntungkan dapat dicapai sebagaimana mestinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, disebutkan bahwa *regional cooperation* atau kerja sama daerah merupakan usaha bersama dalam hal untuk mewujudkan *public services* yang mendatangkan *mutual benefit* atau mutualisme antara satu daerah dengan daerah lain, daerah dan pihak ketiga, daerah dan institusi/lembaga di luar negeri.²³ Peraturan tersebut membagi kerja sama internasional yang dilakukan oleh daerah menjadi KSDPL atau KSDLL, dimana aturan ini disebutkan kembali pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 kerja sama daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah luar negeri (KSDPL) dan kerja sama pemerintah daerah dengan lembaga di luar negeri (KSDLL). Kedua jenis kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan harus

²³ Laode M. F, 2022, *The Role of Paradiplomacy and the Potential Proto-Diplomacy in the Unitary State*, *Journal of Islamic World and Politics*, 6(2), lihat: <https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/15677>

memenuhi kriteria: adanya hubungan diplomatik antara pihak yang bersangkutan, menjadi urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri, hubungan pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri tidak dapat mencampuri urusan pemerintah dalam negeri, dan implementasinya disesuaikan dengan kebijakan dan rencana pembangunan daerah. Apabila fokus kerja sama daerah dengan pihak-pihak luar negeri merupakan bidang pengetahuan dan teknologi, implementasi kerja samanya harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia di daerah yang bersangkutan. KSDPL memiliki beberapa faktor yang menjadi syarat terbentuknya sebuah kerja sama persahabatan (*sister province*) seperti kesamaan karakteristik kedua daerah (persamaan kedudukan dan status administrasi, kesamaan ukuran/wilayah dan fungsinya), kesamaan permasalahan, dan persamaan kondisi yang saling melengkapi dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁴

Selain itu, terdapat juga peraturan yang sangat melekat pada istilah paradiplomasi di Indonesia dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 mengatur tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Dalam aturan tersebut, telah tertulis aturan dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia yang akan melakukan kerja sama luar negeri bersama dengan pemerintah daerah di luar negeri maupun lembaga di luar negeri. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari

²⁴ Kementerian Dalam Negeri RI, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri,” 2020, lihat: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143323/permendagri-no-25-tahun-2020>.

tahap prakarsa dan peninjauan, pernyataan kehendak kerja sama (LoI), penyusunan rencana kerja sama, persetujuan DPRD, verifikasi, penyusunan rancangan naskah kerja sama, pembahasan naskah kerja sama antara pemerintah daerah bersama kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait dengan difasilitasi oleh Fasilitas Kerja Sama dari Kemendagri, persetujuan Menteri Dalam Negeri, penandatanganan naskah kerja sama (MoU) oleh kepala daerah, dan pelaksanaan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan setiap tahunnya oleh pemerintah daerah kepada Kemendagri melalui Sekretariat Jenderal Pusat Fasilitas Kerja Sama.

1.5.2 C2C Key Factors dan Analisa SWOT

Dalam hal untuk mengusahakan kesuksesan perusahaan atau bisnisnya, sejatinya para pelaku usaha tidak bisa selalu bermain aman dan mengikuti tren tradisional yang sudah tidak relevan di dunia modern ini. Ford Motor Company, saat berada di bawah kendali Alan Mullaly sebagai CEO yang baru, mengambil strategi resiko yang sangat berpengaruh pada keadaan finansial perusahaan yaitu dengan mengembangkan kendaraan dengan memperbaharui desain interior, menambahkan *fuel-efficient engines* sebagai mesin kecil penghemat energi, serta pembagian suku cadang dari produk mobil SUV dan truk untuk penghematan biaya dengan pengurangan jumlah sasis sebesar 40%. Pada tahun 2009, Ford Company membuktikan akan pentingnya *strategic management* yang lebih fokus pada hal yang ingin dicapai di masa depan— brand domestiknya meraih rating “above average” pada *J. D. Power and Associates’ 2009 Vehicle Dependability Study* dengan merencanakan tujuan organisasi secara keseluruhan (*plan organization-*

wide objectives), memulai strategi (*initiate strategy*), dan menetapkan kebijakan (*set policies*).²⁵

Perubahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam setiap pengorganisasian dan perencanaan. *Strategic Management* menjadi hal yang penting untuk diperhatikan bagi setiap organisasi atau lembaga yang ingin memaksimalkan potensi yang dimiliki. Hunger dan Wheelen berpendapat dalam bukunya yang fenomenal di dunia bisnis dan industri yaitu "*Essentials of Strategic Management*" bahwa *strategic management* adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang dapat dijadikan sebagai alat evaluasi yang menentukan kinerja jangka panjang sebuah perusahaan.²⁶ Dalam strategi ini terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi dalam manajemen perusahaan yaitu *environmental scanning* (faktor internal dan eksternal), perencanaan strategis, implementasi strategis, dan evaluasi dan kontrol. Untuk itu, *strategic management* menekankan pada pemantauan dan evaluasi faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman dengan tetap mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Hal ini dilakukan agar sebuah perusahaan dapat menemukan dan menerapkan arah strategi yang lebih objektif bagi suatu organisasi.²⁷

Apabila dikaitkan dengan kerja sama persahabatan atau dalam *term* lain disebut juga *sister city* atau *sister province*, *strategic management* yang dimaksud sesuai dengan penelitian Hans Buis pada tahun 2009 terkait faktor-faktor yang

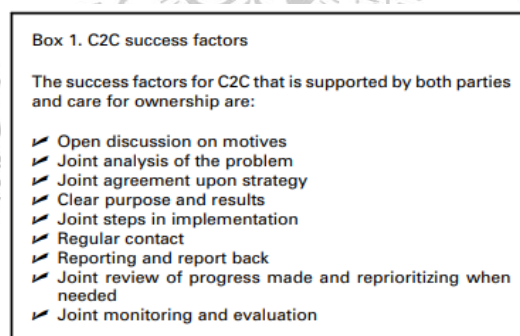
²⁵ Thomas L. Hunger, J. David; Wheelen, *Essentials of Strategic Management*, Fifth Edit (Pearson Education Limited, 2014), Hal. 11, lihat: [https://exthost.org/Media/Essentials of strategic management by Wheelen, Thomas L. Hunger, J. David \(z-lib.org\).pdf](https://exthost.org/Media/Essentials%20of%20strategic%20management%20by%20Wheelen,%20Thomas%20L.%20Hunger,%20J.%20David%20(z-lib.org).pdf).

²⁶ Ibid. Hal. 12

²⁷ Ibid.

mempengaruhi keberhasilan *city-to-city* (C2C) *cooperation* yang melibatkan para aktor non negara yaitu *local government* yang menjalin hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah di negara lain, terutama di benua Eropa. *Strategic management* memiliki kemiripan dengan faktor-faktor keberhasilan kerja sama yang juga dikenal sebagai *C2C success factors* yang dikemukakan oleh Buis dalam penelitiannya yang berjudul “*The role of local government associations in increasing the effectiveness of city-to-city cooperation*”. Kesamaannya terletak pada objektivitas dan tujuan akhir peningkatan kualitas organisasi, kerja sama, bahkan lembaga atau perusahaan melalui pemantauan faktor internal dan faktor eksternal yang terlihat setelah adanya proses perencanaan, implementasi, serta evaluasi dan kontrol.²⁸

Gambar 1. 1 *C2C Success Factors by Hand Buis*



Sumber: Buis, Hans. “*The Role of Local Government Associations in Increasing the Effectiveness of City-to-City Cooperation.*” *Habitat International* 33, no. 2 (2009): 192. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.10.017>.

Pada gambar di atas disebutkan bahwa faktor pertama yang menjadi *starting point* dalam sebuah kerja sama adalah adanya *open discussion* yang melibatkan para pemangku kepentingan yang dapat memunculkan inisiasi awal kerja sama dan

²⁸ Hans Buis, “*The Role of Local Government Associations in Increasing the Effectiveness of City-to-City Cooperation,*” *Habitat International* 33, no. 2 (2009): Hal. 192, <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.10.017>.

untuk mengetahui tujuan utama adanya kerja sama. Selain itu dalam tahapan ini, kedua pihak memiliki kesempatan untuk saling bertukar informasi tentang potensi-potensi di daerah masing-masing. Tahapan kedua yaitu *problem analysis* merupakan proses dimana para pihak melihat fenomena yang muncul dan mencari solusi yang dapat digunakan sebagai bentuk realisasi kerja sama. Adapun rencana-rencana yang telah dibahas dalam kedua langkah sebelumnya, berupa *agreement on strategy*, menjadi bahan acuan yang kuat bagi kedua daerah atau C2C untuk merancang naskah perjanjian (MoU) yang mengikat kedua pihak, serta menetapkan tujuan bersama untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi keduanya, *clear purpose and results*. Selanjutnya, kedua daerah menjalankan kerja sama dengan mengimplementasikan poin-poin kerja sama yang telah disepakati. Kedua daerah juga diharapkan melakukan koordinasi secara rutin melalui kelompok kerja yang berisi para *stakeholders* untuk meninjau ulang aspek-aspek kerja sama untuk jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai kerangka pada penulisan laporan yang lebih terstruktur. Tahapan berikutnya adalah dilakukannya evaluasi dan monitoring untuk dapat melihat seberapa jauh kerja sama ini dapat mencapai tujuan diadakannya kerja sama dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini juga dilakukan atas dasar keinginan kedua pihak untuk dapat menyusun kembali pengaturan prioritas kemitraan yang selanjutnya.²⁹

Analisa SWOT menjadi penting untuk dilakukan dalam melihat evaluasi keberhasilan kerja sama karena dapat melihat faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan kerja sama, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang

²⁹ Ibid.

berasal dari lingkungan sekitar di mana kerja sama ini berlangsung.³⁰ *Environmental scanning* atau pemantauan terhadap faktor internal dan eksternal dibutuhkan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi seberapa berhasilnya kerja sama *sister province* DIY dan Victoria ini berjalan. Maka dari itu, diperlukan model analisa SWOT lainnya yang dapat membantu penulis dalam melihat *strategic management* yang lebih objektif, salah satunya yaitu David's *TOWS Matrix* seperti gambar berikut berdasarkan penjelasan pada buku "*Strategic Management*" edisi keempat karangan Fred David pada tahun 1993 yang dirujuk dari tulisan pada artikel *Community Tool Box*.³¹

Gambar 1. 2 *Fred David's TOWS Matrix*

	STRENGTHS	WEAKNESSES
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4.
OPPORTUNITIES	Opportunity-Strength (OS) Strategies Use the strengths to take advantage of opportunities <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 	Opportunity-Weakness (OW) Strategies Overcome weaknesses by taking advantage of opportunities <ol style="list-style-type: none"> 1. 2.
THREATS	Threat-Strength (TS) Strategies Use strengths to avoid threats <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 	Threat-Weakness (TW) Strategies Minimize weaknesses and avoid threats <ol style="list-style-type: none"> 1. 2.

Sumber: *Section 14. SWOT Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. COMMUNITY TOOL BOX.* url: <https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/swot-analysis/main#>

³⁰ Dito Aditia Darma Nasution et al., "*Identifikasi Strategi Keberhasilan Layanan E-Government Di Kota Medan,*" *Jurnal Kajian Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* 11, no. 2 (2020): 106–12, lihat: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/paedagogia>.

³¹ *Community Tool Box, Section 14. SWOT Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats,* University of Kansas, lihat: <https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/swot-analysis/main>

Gambar di atas dapat mendeskripsikan 4 (empat) model strategi yang dapat digunakan dalam menganalisa sebuah kegiatan yang telah berjalan. Sebuah perencanaan yang telah dilakukan dapat menggunakan kekuatannya untuk menemukan peluang-peluang pengembangan suatu kegiatan: *opportunity-strength* (OS) atau mengubah kelemahan dengan menemukan solusi yang tepat agar dapat menjadi inovasi pembaharuan terhadap pengembangan kegiatan yang telah berjalan: *opportunity-weakness* (OW). Adapun penggabungan model strategi lainnya adalah menggunakan kekuatan perencanaan sebagai alternatif cara untuk mencegah munculnya ancaman pada kegiatan yang telah atau sedang berlangsung: *threat-strength* (TS). Dan model strategi yang terakhir adalah menganalisis lebih awal tentang kelemahan yang dimiliki dalam sebuah perencanaan kegiatan agar dapat diminimalisir dan mencegah munculnya ancaman-ancaman yang dapat terjadi: *threat-weakness* (TW).³²

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, dimana penulis berusaha menggambarkan sebuah fenomena yang telah terjadi dan masih berlangsung yang dijabarkan melalui proses pengumpulan fakta, pemilahan fakta, dan generalisasi fakta.³³ Penelitian deskriptif biasanya digunakan untuk menjelaskan pertanyaan “apa” dan “bagaimana” sebuah fenomena dapat terjadi

³² Community Tool Box. *Op., Cit.*

³³ Assegaff, Damayanti, and Suryo, *Op., Cit.*

yang dikaitkan dengan fenomena lainnya. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan efektivitas kerja sama luar negeri yang dijalankan oleh Pemda DIY dan Negara Bagian Victoria, Australia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber yang berada di lingkup bidang kerja sama luar negeri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY sebagai data primer, serta studi pustaka terhadap beberapa naskah perjanjian antara pihak yang terkait dalam kerja sama persahabatan/*sister*, jurnal, skripsi, laporan, *proceeding*, artikel dan berita online sebagai data pendukung.

1.6.2 Metode Analisa Data

Teknik Analisa data yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan menganalisa data dengan menunjukkan kualitas suatu fenomena dengan menginterpretasikan fakta-fakta yang diperoleh dalam tulisan.³⁴ Penulis mengumpulkan data kualitatif berbentuk informasi-informasi dari informan yang mendukung penelitian untuk dijadikan sumber rujukan utama dalam pembahasan penelitian dengan menganalisa kerja sama *sister* menggunakan konsep paradiplomasi. Selanjutnya penulis menggunakan konsep analisa SWOT yang dikombinasikan dengan Fred David's TOWS Matrix untuk mengetahui faktor internal dan eksternal, serta strategi apa yang dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi kerja sama *sister province* antara DIY dan Negara Bagian Victoria, Australia di bidang kebudayaan. Data sekunder yang berhasil dikumpulkan oleh

³⁴ Patrik Aspers and Ugo Corte, "What Is Qualitative in Qualitative Research," *Qualitative Sociology* 42, no. 2 (2019): 139–60, lihat: <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>.

penulis kemudian diseleksi dan diolah menjadi data pendukung dalam pembahasan penelitian.

1.7 Argumen Pokok

Kerja sama luar negeri yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Negara Bagian Victoria, Australia telah aktif berjalan sejak tahun 2017 – 2020 pasca penandatanganan MoU oleh Kepala Daerah di kedua belah pihak. Kerja sama persahabatan ini berfokus pada 3 (tiga) bidang kerja sama yaitu industri kreatif, inovasi industri, dan pendidikan. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis hanya membahas bidang kerja sama persahabatan antara DIY dan Negara Bagian Victoria, Australia di bidang kebudayaan. Dalam perjalanannya, kerja sama ini telah menunjukkan beberapa implementasi yang telah diwujudkan dalam berbagai kegiatan/*event* kebudayaan yang diselenggarakan sepanjang tahun aktif kerja sama berlangsung. Berbagai kegiatan itu adalah *Asia Pacific Triennial of Performing Art (ASIA TOPA)*, *Youth Music Camp*, pengiriman delegasi pelajar dalam kegiatan *Young Leaders* kedua belah pihak.

Kerja sama ini telah berakhir masa berlaku MoU-nya pada tahun 2020 dan direncanakan akan diperpanjang lagi untuk tahun-tahun selanjutnya melalui proses pembaharuan MoU kerja sama. Kendati demikian, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam proses keberlanjutan kerja sama persahabatan ini, seperti adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mengelola kerja sama. Namun, pada bidang kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan DIY dan MSO melalui kerja sama teknis dapat berjalan baik, bahkan hingga tahun 2022. Maka dari itu, evaluasi keberhasilan kerja sama *sister province* ini dapat dianalisis

melalui *C2C key factors* dan analisis SWOT, serta konsep paradiplomasi yang menjelaskan tentang bagaimana kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah itu berjalan. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan kesesuaian antara pelaksanaan kerja sama luar negeri dengan aturan yang berlaku selama kerja sama ini berlangsung.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
1.3.2 Manfaat Penelitian
1.4 Penelitian Terdahulu
1.4.1 Paradiplomasi dan Kerja Sama <i>Sister</i> di Indonesia
1.4.2 Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Kerja Sama Luar Negeri di DIY
1.5 Kerangka Konseptual
1.5.1 Paradiplomasi
1.5.2 <i>C2C Key Factors</i> dan Analisa SWOT
1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Tipe Penelitian
1.6.2 Metode Analisa Data
1.7 Argumen Pokok

1.8 Sistematika Penulisan
Bab II: ANALISA KEPENTINGAN KERJA SAMA <i>SISTER PROVINCE</i> BAGI D.I. YOGYAKARTA DAN VICTORIA, AUSTRALIA DI BIDANG KEBUDAYAAN
2.1 Persamaan Karakteristik Pemda DIY dan Negara Bagian Victoria 2.1.1 Persamaan Status Administrasi Antara DIY dan Victoria 2.1.2 Persamaan Potensi Daerah di Bidang Kebudayaan: Seni Musik dan Manajemen Pertunjukkan 2.2 Urgensi dan Kronologi Penyusunan Kerja Sama <i>Sister Province</i> DIY – Victoria di Bidang Kebudayaan 2.2.1 Urgensi Kerja Sama <i>Sister Province</i> DIY – Victoria di Bidang Kebudayaan 2.2.2 Kronologi Penyusunan MoU Kerja Sama <i>Sister Province</i> DIY – Victoria di Bidang Kebudayaan
Bab III: EVALUASI KERJA SAMA <i>SISTER PROVINCE</i> ANTARA D.I. YOGYAKARTA DAN VICTORIA, AUSTRALIA DI BIDANG KEBUDAYAAN
3.1 Evaluasi Kerja Sama <i>Sister Province</i> Antara DIY dan Victoria Melalui <i>C2C Success Factors</i> 3.2 Analisa SWOT terhadap Kerja Sama <i>Sister Province</i> DIY-Victoria di Bidang Kebudayaan
Bab IV: Kesimpulan dan Saran
Daftar Pustaka